



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 31 Juli 2021

Halaman: 1

Belum Semua Mendapat Bantuan

BELUM seluruh PKL di kawasan Malioboro menerima bantuan modal usaha yang dijanjikan Pemda DIY. Relaksasi tersebut disalurkan melalui koperasi yang menaungi pelaku usaha di kawasan itu. Namun, skema penyaluran tersebut dianggap belum merata karena tidak semua pelaku usaha dan paguyuban di kawasan

ke halaman 11

Belum Semua

● Sambungan Hal 1

Malioboro tergabung atau berbadan hukum koperasi. Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putro mengatakan, di Malioboro tercatat ada 11 paguyuban PKL dengan anggota lebih dari 2.000 pedagang. Sedangkan yang telah tersentuh bantuan baru dua paguyuban dengan kisaran sebanyak 1.000 pedagang. Dia merinci, koperasi yang telah menerima bantuan adalah Koperasi PKL Tri Dharma dan Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKLY). "Untuk kawasan Malioboro, Tri Dharma itu 700 hingga hampir 1.000 (anggota) dan PPKLY sekitar 87. Cuma kalau PPKLY ini kan di seluruh kota tidak hanya di Malioboro," terangnya saat ditemui usai beraudensi dengan Pemda DIY di Kompleks Kepatihan, Jumat (30/7). Sebanyak sembilan paguyuban lainnya hingga saat ini belum tercover bantuan pemerin-

tah karena tidak ada koperasi yang menaunginya. Misalnya, Pelmani yang memiliki sekitar 400 anggota, serta pedagang angkringan, PKL lesehan, PKL pasar sore yang masing-masing memiliki sekitar 40 anggota. Kemudian juga terdapat Paguyuban Pedagang Pasar Sentir dengan kisaran sebanyak 400 pedagang. "Karena kaki lima ini paguyuban, kalau denger koperasi agak mumet (pusing)," jelasnya. Sujarwo pun mengusulkan, agar penyaluran bantuan modal juga melibatkan paguyuban-paguyuban pelaku usaha di kawasan itu. "Kalau tidak gitu bakal ada sembilan paguyuban yang tidak bisa akses itu," jelasnya. Menurutnya, jika pemerintah kesulitan untuk mencari sumber pendanaan bantuan, Pemda DIY bisa saja memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais) yang tahun ini disalurkan dengan total sebanyak Rp1,3 miliar. Sebab, kawasan Malioboro merupakan kawasan cagar budaya dan pengembangannya di

bawah naungan dinas kebudayaan. "Mereka (PKL) ini berada di kawasan cagar budaya. Berada di bawah disbud. Kan bantuan lain bisa," paparnya.

Beberapa skema

Terpisah, Asisten Sekretaris Daerah (Setda) DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi mengungkapkan, Pemda DIY memang telah menyiapkan beberapa skema untuk membantu PKL terdampak kebijakan PPKM Darurat maupun sekarang bernama PPKM Level 4. Sementara ini, penyaluran relaksasi dilakukan melalui koperasi yang menaungi pelaku usaha. Terkait adanya tuntutan dari Paguyuban Kawasan Malioboro, Sumadi mengaku akan mengomunikasikannya dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. "Usulan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan apakah nanti ada kebijakan khusus terkait hal ini akan kita sampaikan. Karena kebijakan itu ada pada beliau (Gubernur DIY)," jelasnya. (tro)

1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005